

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, R. (2023). Keterkaitan kebijakan perhutanan sosial dalam upaya penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 18(2), 93-104.
- Ahmad, S., Sardjono, M. A., Setiawati, E. P., Kristiningrum, R., & Suhardiman, A. (2024). Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam peningkatan kinerja Kelompok Perhutanan Sosial di Delta Mahakam. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 8(1), 170-182.
- Anggito, A., & Setiawan, J. 2018. Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Habibah, Eva, N. (2021). Collaborative Governanace. Pustaka Rumah C1nta.
- Hidayah, M. (2018). “Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa di SMP 11 Ma’arif Bangsalsari-Jember Tahun Pelajaran 2017/2018” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- KKI Warsi Terapkan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (<https://www.antaranews.com/berita/4571366/kki-warsi-terapkan-pengelolaan-hutan-berbasis-masyarakat>). Diakses pada 15 Maret 2025.
- Liasari, P. A. (2021). *Analisis penerapan sak emkm pada laporan keuangan umkm di kota batam* (Doctoral dissertation, Prodi Akuntansi).
- Mahardika, A., & Muyani, H. S. (2021). Analisis legalitas perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 10-18.
- Manullang S. 2021. Teori dan Teknik Analisis Stakeholder Edisi Pertama. IPB Press.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*

Pattipeilohy, A., & Lema, R. K. 2023. Akuntabilitas Layanan Publik Terhadap Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya. PT Literasi Nusantara Abadi Grop. Malang.

Perhutanan Sosial Manifestasi Konkret Pemerintah Ke Rakyat (<https://prcfindonesia.org/perhutanan-sosial-manifestasi-konkret-pemerintah-ke-rakyat/>). Diakses pada 16 Maret 2025.

Perkembangan Perluasan Hutan Sosial Pertahun (<https://sipssumbar.dishut.sumbarprov.go.id/chart/ppp>). Diakses pada 03 Maret 2025.

Permasalahan Tenurial dan Konflik Hutan dan Lahan. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/permasalahan-tenurial-dan-konflik-hutan-dan-lahan/>. Diakses pada 28 April 2025.

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/310957/perda-prov-sumatera-barat-no-1-tahun-2024>).

Peraturan Kementerian LHK Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/235324/permen-lhk-no-83-tahun-2016>).

Peraturan Kementerian LHK Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/253766/permen-lhk-no-4-tahun-2023>).

Prasetyo, E. (2020). Analisis Efektifitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Konteks Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement): Studi Kasus Program Revaluasi Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 10(2), 1-16.

Priasti, S. N., & Suyatno, S. (2021). Penerapan Pendidikan Karakter Gemar Membaca Melalui Program Literasi di Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 7(2), 395-407.

Rachmawati, f dkk. 2024. Manajemen Stakeholder dan Etika Public Relations. AE Publishing.

Rahman, Fajri, Apriwan Apriwan, and Ade Irwandi, 'Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Pada Hutan Lindung Gambut (HLG) Di Desa Pematang Rahim Provinsi Jambi', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24.2 (2024), 1007.

Rahman, F., Irwandi, A., & Apriwan, A. (2024). Hutan Nagari Simancuang: Pengelolaan Hutan Skema Perhutanan Sosial di Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(3), 2190-2198.

Riduwan. 2013. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula. Bandung: Alfabeta.

Rincian Informasi Hutan Nagari Halaban (https://tanahkita.id/data/wilayah_kelola/detil/NnVYUnloME5rY3c). diakses pada 03 Maret 2025.

Siti, M. (2022). Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik.

Sosialisasi Perhutanan Sosial Terhadap Pemilik Ladang di Kawasan Hutan Nagari Halaban. (<https://warsi.or.id/id/sosialisasi-perhutanan-sosial-terhadap-pemilik-ladang-di-kawasan-hutan-nagari-halaban/>). Diakses pada 27 Februari 2025.

Susilowati, S. (2015). *Konflik tenurial dan sengketa tanah kawasan hutan yang dikelola oleh perum perhutani* (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).

Sugiono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Suharjito, D., Rahayu, N. H., Kartika, N., Arsyad, A. A., & Meilantina, M. 2023. Perhutanan Sosial: Sinergi Lintas Sektor dan Multi Pihak (Issue 13). IPB Press.

Suryaningsih, S. (2024). Determination of Community Readiness and Participation Post-Social Forestry Permit: Analysis of Internal and External Factors. *Adabi: Journal of Public Administration and Business*, 11(1), 69-80.

Syofiarti, S., Fatimah, T., & Yades, K. M. (2023). Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 444-461.

Tahir, M. M. (2015). Good urban governance: Peran pemerintah dalam pembangunan wilayah kecamatan di Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9-16.

Tamrin, M, & Lubis Lunarian. 2023. Pengelolaan KEE Ujung Pangkah Melalui Kolaborasi Stakeholder. PT Literasi Nusantara Abadi Group.

Wulandari, C., Herwanti, S., & Febryano, I. G. (2018). Peran kelembagaan nagari dalam pengelolaan hutan di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok. *Gorontalo Journal of Forestry Research*, 1(2), 30-39.